

## **KOMITMEN NASIONAL UNTUK BENSIN TANPA TIMBEL**

Perkembangan penghapusan bensin bertimbel di Indonesia mengalami proses pasang surut setelah tercapai kesepakatan pada workshop multi stakeholders mengenai penghapusan bensin bertimbel bulan Februari 2000 yang lalu. Pada workshop tersebut Departemen Pertambangan dan Energi RI menyetujui usulan Pertamina bahwa per 1 Juni 2001 Jabotabek akan bebas bensin bertimbel, sementara secara nasional per 1 Januari 2003. Hal ini menunjukkan telah ada **komitmen nasional** untuk menerapkan kebijakan penghapusan bensin bertimbel.

Upaya penghapusan bensin bertimbal yang dicanangkan oleh Pemerintah RI –*sebagaimana tanggal tersebut di atas*– kemungkinan akan gagal apabila tidak ada kebijakan yang mendorong komitmen seluruh stakeholder. Untuk itu, KPBB menyelenggarakan lokakarya “The Leaded Gasoline Phasing Out and Realistic Fuel Pricing Policy” guna membangun komitmen antar pembuat kebijakan dalam menggali dukungan semua pihak.

Sementara diketahui, untuk penerapan bensin tanpa timbel dapat ditempuh melalui 2 (dua) alternatif yang keduanya juga memungkinkan dijalankan secara parallel. Kedua alternatif tersebut adalah:

1. Alternatif Jangka Pendek; yaitu penerapan bensin tanpa timbel yang membutuhkan tenggat waktu 1 tahun atau kurang. Secara teknis ini dapat ditempuh dengan penggunaan oxygenate (ethanol, ETBE, MTBE) atau additive non timbel (MMT) untuk meningkatkan angka octane.
2. Alternatif Jangka Panjang; yaitu penerapan bensin tanpa timbel yang membutuhkan tenggat waktu antara 3 – 5 tahun. Secara teknis ini ditempuh dengan pembangunan catalytic reformer dan isomerisasi yang menghasilkan HOMC; bahan baku bensin tanpa timbel.

Alternatif jangka pendek relatif tidak memerlukan biaya investasi. Sementara untuk alternatif jangka panjang diperlukan investasi berkisar antara US\$ 190 juta – 230 juta. Mengingat telah diperoleh **komitmen nasional** seperti dijelaskan di atas, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah ***fund rising*** guna penyediaan dana untuk pembiayaan investasi yang dibutuhkan pada alternatif jangka panjang. Pada tataran ini, peran Departemen Keuangan RI menjadi penting dalam penerapan kebijakan bensin tanpa timbel. “Upaya penghapusan bensin bertimbal harus didukung dan Menko Ekonomi sangat concern pada upaya ini karena penerapan bensin bertimbal costnya sangat mahal untuk jangka panjang. Meski untuk jangka pendek – sesaat – memang cukup murah” demikian disampaikan oleh DR Dipo Alam yang hadir sebagai pembicara pada lokakarya ini.

Berdasarkan SK Mentamben RI Nomor 1585K/32/MPE/1999, alternatif jangka panjang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bensin tanpa timbel per 1 Januari 2003. Sementara itu, alternatif jangka pendek dimaksudkan untuk mengurangi resiko pencemaran udara khususnya yang diakibatkan oleh timbel (Pb) di kawasan padat lalu lintas. Misalnya, sesuai komitmen nasional di atas bahwa per 1 Juni 2001 Jabotabek akan bebas bensin bertimbel. Mengapa Jabotabek perlu diprioritaskan? Hal ini terkait dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang mencapai 4 juta unit dan tingkat konsumsi bensin mencapai 30%

dari permintaan nasional atau lebih dari 3 juta KL per tahunnya; telah menyebabkan udara tercemar timbel hingga 0,2-1,8  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Seperti diketahui, nilai ambang batas yang ditetapkan WHO adalah 0,5  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  bahkan belakangan tidak ada nilai ambang yang aman untuk pencemaran timbel karena sebagai logam berat, timbel bersifat akumulatif ketika telah masuk ke dalam tubuh. Di sisi lain, Jabotabek adalah kawasan yang paling siap untuk penerapan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas udara. Dan upaya ini tidak dapat dimulai bila bensin masih mengandung timbel.

Pada tataran ini, peran inisiatif Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI dalam menetapkan spesifikasi unleaded gasoline sesuai tuntutan Jabotabek sangat didambakan oleh masyarakat, sehingga per 1 Juni 2001, Jabotabek benar-benar bebas bensin bertimbel.

Sementara itu, pada lokakarya ini berhasil dikeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi intensi antara Departemen Keuangan RI, BAPPENAS, BAPEDAL dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral guna menyusun rencana aksi sebagai mana yang dibutuhkan untuk pengadaan bensin tanpa timbal jangka pendek dan jangka panjang seperti di sebut di atas.
2. Perlu ditetapkan rencana aksi penghapusan bensin bertimbal sebagai berikut:
  - a. Jangka pendek; 1 Januari 2001 Jabotabek bebas bensin bertimbel; dapat ditempuh dengan penggunaan oxygenate (seperti ethanol, ETBE, MTBE) dan atau additive non timbel (seperti MMT) sebagai octane booster
  - b. Jangka panjang; 1 Januari 2003 nasional bebas bensin bertimbel; ditempuh dengan refinery modification dan isomerisasi
  - c. Penerapan ORI/CCD control additive.
3. Perlu mendorong SK 1585 K /32/MPE/1999 dikembangkan menjadi Kepres (mempermudah koordinasi lintas sektor) dan secara formal mampu memberikan legitimasi rencana aksi pada point 5 serta dibukanya peluang investasi penyediaan bensin tanpa timbel kepada pihak swasta.
4. Perlu dikembangkan public communication guna membangun pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif bensin tanpa timbal. Public communication ini juga dimaksudkan untuk membangun public pressure dalam rangka mendorong dikeluarkannya kebijakan bensin tanpa timbal.
5. Perlu dilakukan monitoring terhadap perkembangan penerapan bensin tanpa timbal.
6. Perlu ditetapkan kebijakan harga yang realistis dan memberikan insentif bagi pemakaian energi bersih termasuk bensin tanpa timbal.

Demikian ringkasan hasil lokakarya “The Leaded Gasoline Phasing Out and Realistic Fuel Pricing Policy” yang diselenggarakan oleh Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) pada tanggal 21 November 2000 di Hotel Mandarin Oriental – Jakarta. Hadir sebagai pembicara pada lokakarya tersebut adalah Soedarsono (Sesemen LH), Dipo Alam (Deputi Bidang Lingkungan dan Energy Menko Ekonomi), (Chandra B Prakash (Advisor BAPPENAS), Maskurun (Asisten Direktur Pengolahan Pertamina), Endi M Bayuni (The Jakarta Post). Sementara yang hadir sebagai peserta mencakup seluruh stakeholder penghapusan bensin bertimbal seperti Bapedal, Bappenas, MIGAS, Lemigas, Gaikindo, IATO, Pertamina, LSM, sector swasta dll.

Jakarta, 21 November 2000

**Ahmad Safrudin**